

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PROPINSI LAMPUNG TERHADAP KAWASAN KONSERVASI

Ir. Rahmad Abdullah
Kepala Bapedalda Propinsi Lampung
Disampaikan oleh : Ir. Hanibaal Salim

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Propinsi Lampung yang mempunyai letak geografis yang strategis, dengan keadaan tanah yang relatif subur, hutan tropis yang ditumbuhi beranekaragam flora dan fauna, serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai (transportasi dan komunikasi) yang menjadikan Propinsi Lampung sebagai salah satu tujuan pariwisata dan kegiatan pemanfaatan potensi daerah yang dimilikinya termasuk potensi sumberdaya hutan.

Hutan di Propinsi Lampung merupakan hutan Indonesia yang disebut dunia internasional sebagai hutan tropis atau hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Luas hutan di Propinsi Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kemasyarakatan (TGHK) adalah seluas ± 1.083.749 ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 336.100 ha, hutan suaka alam/wisata seluas 422.500 ha, hutan produksi tetap seluas 281.029 ha, hutan produksi terbatas seluas 44.120 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 153.000 ha. Hingga tahun 1997 kerusakan hutan yang terjadi sudah sangat tinggi, kerusakan yang paling parah adalah kerusakan hutan produksi yang dapat dikonversi yang hampir mencapai 100 % telah menjadi pemukiman dan perladangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan hutan negara untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitik beratkan kepentingan mensejahterakan masyarakat.

Banyak sekali keuntungan pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan wisata alam dengan pemanfaatan hutan, salah satunya adalah kegiatan pengusahaan pariwisata alam. Selain dapat melibatkan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata yang diupayakan tersebut, tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokasi kegiatan pariwisata

tersebut. Dengan konsep tersebut diatas, diharapkan masyarakat sekitar dapat merasa memiliki hutan tersebut serta dapat merasakan adanya ketergantungan kesejahteraannya dari hutan. Dengan demikian maka kelestarian hutan dapat terus terjaga.

1.2 . MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Memenuhi permintaan sebagai pemakalah semiloka yang diadakan oleh Jaringan Peduli Way Kambas.

b. Tujuan :

- a) Untuk memberikan gambaran Kebijakan Nasional untuk pembangunan lingkungan hidup di Propinsi Lampung.
- b) Memberikan gambaran arahan, kebijaksanaan dan rencana aksi pembangunan lingkungan hidup .

KONSERVASI TAMAN NASIONAL

Taman Nasional Way Kambas merupakan wilayah konservasi sumber daya alam yang harus dilindungi kelestariannya, selain PPA PT. Suaka Rhino Sumatera, di lokasi Taman Nasional Way Kambas terdapat obyek wisata yang sudah dikenal antara lain Pusat Latihan Gajah (PLG) di Plang Ijo, dan kegiatan konservasi in-situ Badak Sumatra yang berlokasi antara Plang Ijo dengan Resort Way Kanan. Keseluruhan kegiatan tersebut berada pada zona pemanfaatan.

Wilayah konservasi Taman Nasional Way Kambas terdapat dua zona (wilayah) yakni :

1. **Zona Inti dan**
2. **Zona Pemanfaatan**

Zona Inti merupakan wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan/terganggu kelestarian ekosistemnya, karena zona ini merupakan habitat asli dari flora/fauna yang dilindungi untuk melakukan regenerasi (berkembangbiak) melakukan migrasi (perpindahan) pada saat musim kawin atau pada saat musim kemarau dan terutama wilayah tersebut merupakan daerah untuk mencari makan. Karena pada pemanfaatannya akan sangat mempengaruhi lingkungan asli dan kehidupan satwa liar di kawasan tersebut.

Zona Pemanfaatan merupakan wilayah/daerah yang dapat dikembangkan/dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan pariwisata alam. Adapun zona yang

dipergunakan/dimanfaatkan dalam kegiatan PPA. PT. SUAKA RHINO SUMATERA yang diupayakan meliputi 3 (tiga) zona yakni :

1. Zona - I (Resort Way Kanan) seluas \pm 975 ha
2. Zona - II (Way Negara Batin/Plang Ijo) seluas \pm 15 ha.
3. Zona - III (Kuala Kambas) seluas \pm 10 ha.

Dengan penataan ruang zona-zona tersebut diharapkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan secara terkendali.

KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM/KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan baik perencanaan, pengemabilan keputusan, law enforcemen (penegakan hukum) pejabat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karenanya, kesamaan presepsi dan sikap semua pihak dalam menghadapi persoalan kelestarian sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama sehingga upaya pengelolaan dan keseimbangan lingkungan hidup sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) PT. SUAKA RHINO SUMATRA pada kawasan Taman Nasional/kawasan wisata tidak saja menghasilkan manfaat, akan tetapi juga membawa resiko. Sebagai contoh adalah kegiatan persiapan lahan dan rencana tapak proyek/kegiatan, serta kegiatan pembinaan dan perlindungan sumber daya alam dan pengawasan terhadap kawasan kegiatan dimana hal-hal tersebut akan berdampak terhadap komposisi dan penyebaran jenis/vegetasi yang dilindungi, juga perubahan komunitas atau penutupan tumbuhan yang akan berpengaruh terhadap habitat flora/fauna, keanekaragaman, serta kemelimpahan individu satwa liar, contoh lain dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan limbah serta perlindungan/pengawasan kawasan akan berdampak terhadap nilai estetika/keindahan dan akan mempengaruhi terutama vegetasi atau satwa liar kemantapan ekosistem di kawasan tersebut dapat tercapai.

KONTRIBUSI MASYARAKAT (KONTROL SOSIAL)

Dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, sosial masyarakat dan kesehatan, kegiatan pengelolaan pengunjung dan kegiatan pembinaan perlindungan sumber daya alam serta pengawasan kawasan dapat secara langsung berpengaruh terhadap persepsi/penilaian masyarakat terhadap kegiatan perusahaan pariwisata alam (PPA) dan lingkungan hidup

yang dilakukan, terutama terhadap faktor kecemburuan sosial. Masalah pendapatan, tatanan sosial budaya dan kesehatan masyarakat juga merupakan faktor-faktor yang kemungkinan dapat timbul akibat dari kegiatan pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi faktor-faktor negatif terutama faktor kecemburuan sosial yakni dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari penduduk disekitar lokasi Taman Nasional Way Kambas, pada tahap pembangunan serta pengadaan tenaga kerja pada tahap kontruksi dan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan seperti penanganan limbah, sebagai tenaga pengawas/keamanan di lokasi Pengusahaan Pariwisata Alam dan lain sebagainya. Serta upaya aktif dari pemrakarsa kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta/partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan dan sanitasi lingkungan serta kebersihan di lingkungan sekitar, untuk mencegah berjangkitnya penyakit. Hal-hal tersebut dapat ditempuh melalui upaya penyuluhan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat secara terus menerus. Sehingga upaya-upaya kemitraan dapat dijalin antara pihak pemrakarsa kegiatan dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam upaya melestarikan fungsi pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat menjadi unsur yang dominan dalam memainkan peran sebagai pengelola fungsi lingkungan hidup. Disini masyarakat dapat berperan sebagai subyek (pelaku) maupun sebagai obyek (sasaran) pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pelaku pengelola, masyarakat berperan dalam menggunakan hak pemanfaatan tanggung jawab memelihara kualitas lingkungan serta menumbuh kembangkan keseimbangan penggunaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan pengelolaan fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat lain.

Sebagai obyek/sasaran pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat yang belum berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan pembinaan, sehingga tumbuh kesadaran untuk melestarikan lingkungan yang dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Oleh karenanya, pengembangan peran serta masyarakat diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan dan dapat mewujudkan kesadaran tersebut menjadi perilaku kehidupan.

PENUTUP

Pada akhirnya, apa yang disajikan pada makalah yang menyangkut pembangunan lingkungan hidup dapat kita simpulkan sebagai berikut :

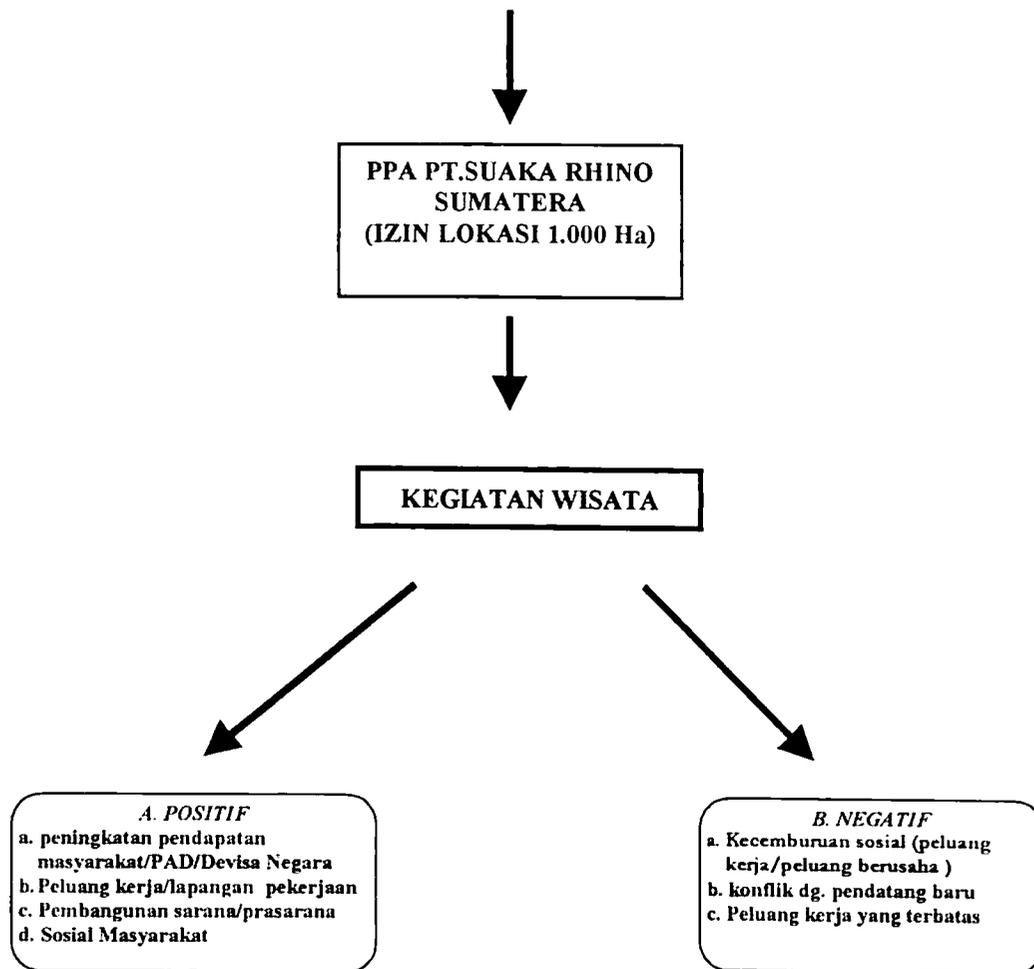
1. Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan sebagai komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, setiap pembangunan yang dilakukan harus dilandasi oleh pertimbangan lingkungan.
2. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan diperlukan langkah-langkah penanganan terpadu di segala bidang, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan sinergi dan keterpaduan langkah.
3. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup ~~di~~ dimasa datang, terlebih lagi dengan disempurnakannya Undang-undang NO. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Ketahanan lingkungan hidup mencakup sikap moral dan etika dalam setiap manusia Indonesia terhadap fungsi dan tatanan serta daya dukung lingkungan Daerah.

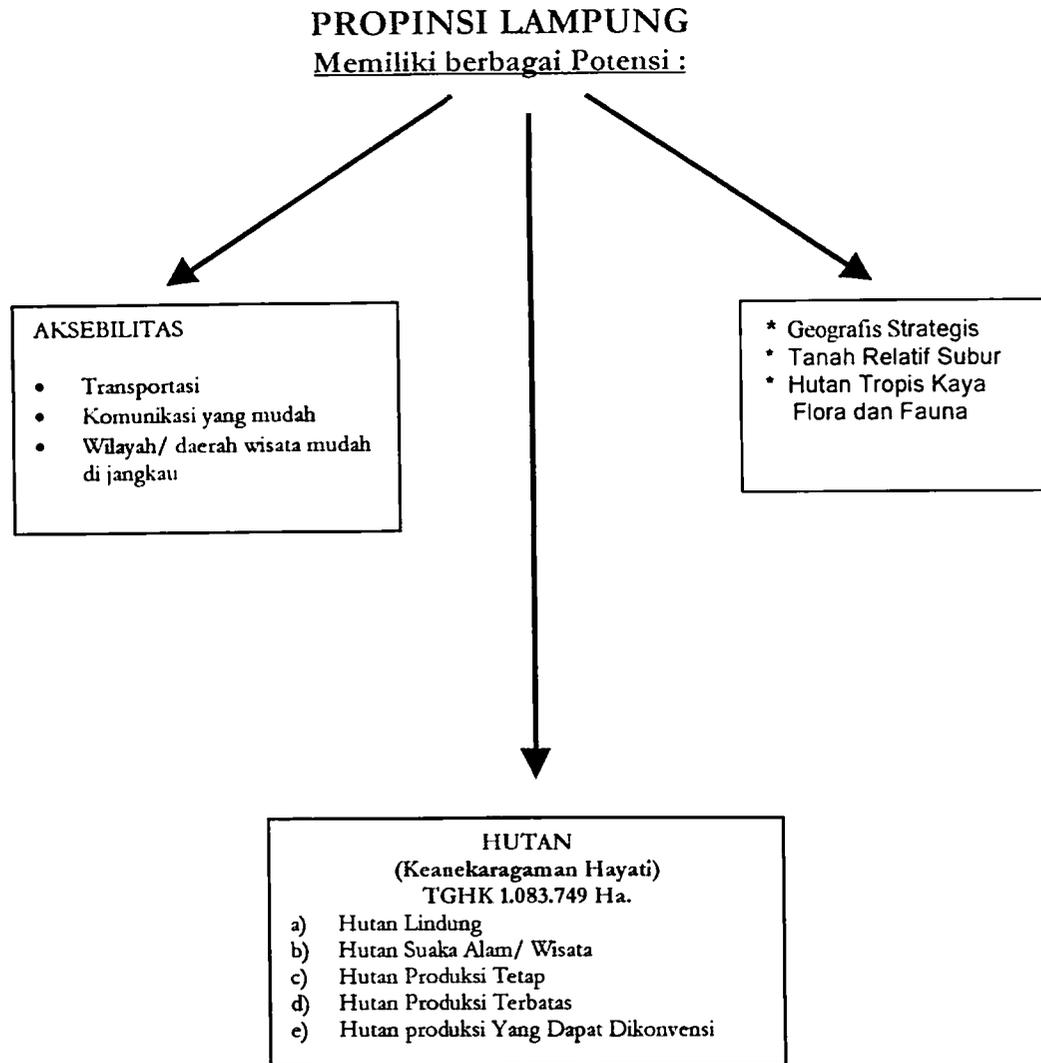
Dengan demikian diharapkan visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai kondisi dan tantangan pada era mendatang.

HUTAN SUAKA ALAM/WISATA
(PROPINSI LAMPUNG ⇔ TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS)

2 KEGIATAN PARIWISATA LAIN :

1. PUSAT LATIHAN GAJAH (PLG)
2. KONSERVASI IN-SITU PENANGKARAN BADAK SUMATERA





DISKUSI

Pertanyaan session I :

Dirman (JPWK) :

Menanggapi masalah yang disampaikan oleh Bapak, saya melihat masyarakat sebagai subjek, dan objek pelaku yang dilakukan konservasi, tapi kenapa hanya masyarakat saja, sedangkan orang-orang perusahaan besar yang banyak duit tidak pernah diberi penyuluhan dampak konservasi terhadap lingkungan. Contoh yang paling nyata di Lampung masih banyak HPH dengan menjarah kayu. Tetapi menurut saya HPH di Lampung sudah tidak ada sejak tahun 90 dimana pengawasan konservasinya pak !

Hazairin (JPWK) :

Menyingkapi makalah yang diberikan bapak ada poin pernyataan "bahwa kontrol ini lemah" tapi saya berpikir ini sengaja dibuat lemah. Apakah proses itu akan dibuat begitu, saya berharap jawaban jujur dari bapak. Apakah dalam pembuatan Amdal SRS Bapedal TK I Lampung di libatkan ?.

Jawab :

Hanibal (Bapedalda TK I Lampung) :

Memang saya akui hutan-hutan makin banyak di tebang dan tidak terkendalikan dan sejujurnya kalau mau jujur ada, Truk-turk box plat merah dimasukkan kayu-kayu jadi ini suatu masalah yang perlu kita pikirkan bersama, dan kita punya kewenangan hak untuk lingkungan yang baik, Jadi semuanya saya lemparkan pada semua temen-temen untuk menyikapi semuanya ini dan jawabannya ada pada saudara-saudara. Kita punya contoh program transmigrasi 35 ribu KK yang harus di translokkan, tetapi sekarang telah berjumlah 80 ribu KK. Ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini melihatkan bahwa masih banyak aturan-aturan yang kita sepakati tidak dijalankan dengan benar.

Memang betul kontrol lemah saya bisa terima, tetapi yang dibuat lemah bukan institusinya tetapi individu-individunya, mengapa demikian? karena peraturan-peraturan tidak transparan, kalau kita lihat di desa-desa biaya menikah lebih mahal kalau kita lihat seharusnya lebih murah, ini disebabkan kontrolnya lemah dalam pengawasan. Dan ada contoh yang menarik waktu Sarwono menjabat Menteri LH membuat statemen dalam mengurus surat tanah berbulan-bulan pada saat itu belum menjadi Menteri. Tetapi setelah dia menjadi Menteri surat-surat tanahnya selesai dalam seminggu.

Apakah Bapedal dilibatkan dalam penyusunan Amdal, saya akan bercerita pada saat di susun oleh pemrakarsa, saya tidak bisa mengatur untuk itu, di dalam proses ini ada mis understanding antar komisi Amdal pusat dengan daerah sehingga proses yang di ajukan pada Komisi Amdal pusat tidak melibatkan Komisi Amdal Daerah. Oleh karena itu di kirimkan ke Gubernur, tetapi kita tidak di ajak dulu, artinya Gubernur mempersilahkan Komisi Amdal Pusat mengesahkan itu, tetapi kami tidak tahu, artinya tidak menolak tepi kalau terjadi apa-apa saya tidak tahu.

Pengesahan di tembuskan ke Bangda, Bangda kaget oleh karena itu Bangda di buat pertemuan antara komisi pusat dan daerah yang di pandu oleh Bangda. Jadi sampai saat ini saya tidak dilibatkan, karena adendum belum di sepakati oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa proses otonomi daerah sudah berlangsung. Dan sekarang prosesnya akan mensosialisasikan melalui pers dan semua komponen. Ini juga akan berpulang pada diri masing-masing (moral yang kita buat).

Pertanyaan session II :

Haerudin R Sajudin (Yayasan Mitra Rhino) :

Mencermati makalah yang di sampaikan oleh bapak !. bahwa ada ganjalan arah kebijakan pembangunan yang lama itu masih ada. Walaupun masih ada Bangda menyelesaikan masalah yang tadi. Kebijakan yang pusat itu harus dirubah dengan adanya otonomi didaerah. Di dalam makalah ini sangat di sayangkan, karena bermanfaat sekali hasil-hasil dan rekomendasi dari Semiloka ini untuk bisa meluruskan arah kebijakan yang baik. Sehingga mengenai perubahan-perubahan yang sah yang seharusnya terjadi itu tidak muncul dalam makalah itu. Agar bapak-bapak yang mewakili Bangda (Hani Baal) untuk memunculkan rekomendasi arah kebijakan pembangunan untuk kawasan-kawasan konservasi, karena kebijakan untuk masyarakat di jadikan objek itu memang di buat demikian. Terpusatnya Amdal harus, ada pengesahan Amdal pusat terjadi antara pemrakarsa tidak melibatkan Amdal daerah, itu ada kolusi atau ada KKN. Sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi di waktu mendatang, khususnya masalah konservasi badak yang pengembangan akan datang di Taman Nasional Way Kambas atau TNBBS. Dengan peraturan yang lebih baik, lebih kuat dan peraturan-peraturan daerah lebih mengarah ke otonomi daerah.

Nyoto Santoso (Moderator /Lab Ekologi IPB) :

Ini sedikit tanggapan dari Pak Eeng dan saran tetapi ada sedikit pertanyaan yang menanyakan rekomendasi apa dari pihak Pemda Lampung terhadap kebijakan pengembangan kawasan konservasi ini !.

Verry Iwan Stiawan (JPWK) :

Ada sedikit pertanyaan agar diskusi sini mendapatkan sesuatu, atau nanti ada rencana aksi kearah kebijakan pengembangan kawasan konservasi. Tetapi disini tidak melihat arah itu dan kami sendiri mempertanyakan kepada Bapedalda. Dan ada beberapa koreksi dalam makalah yang bapak masukkan karena makalah ini akan dimasukkan didalam proseding. Atas dasar apa pembagian kawasan ada dua zona, zona inti dan zona pemanfaatan kami minta penjelasannya !. Disini zona yang di gunakan dan di manfaatkan kegiatan PPA Suaka Rhino melibatkan tiga tempat bukan tiga zona di sana apakah tiga bagian itu memang sudah” merestui” ?

Dijelaskan dalam makalah zona tersebut adalah :

1. Zona resot Way Kanan seluas 975 ha ,
2. Negeri Batin 15 ha dan Kuala Kambas 10 ha.

Memang ini menjadi polemik sekarang zonasi sendiri itu di Taman Nasional harus kita diskusikan lebih lanjut karena saya (Kami JPWK) pernah mengadakan kajian. Ternyata dari hasil potensi penetapan TNWK tahun 1992/1993 itu di ajukan ke Dirjen untuk di sahkan sebagai pemantapan sistem zonasi, dan ada tiga zonasi, yaitu zonasi inti seluas 57764 ha, zona rimba 6879 ha, dan zona pemanfaatan 1325 ha. Jadi perinciannya di sekitar Plang Ijo 200 ha kemudian Way Kanan 100 ha, Bungur 2 ha, PLG 400 ha.

Bapedal menuliskan pernyataan ini berdasarkan apa ?.

Juga di makalah ini dituliskan kegiatan pariwisata ada dampak positif dan negatif, apakah pihak Bapedal tidak melihat dampak negatif itu juga terjadi pada ekosistem dan satwa di sana dan saya tidak melihat tulisan di makalah itu ?. sangat di sayangkan tidak tercantumnya perubahan-perubahan yang terjadi atau kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan kawasan konservasi ini, tentang hal ini saya hanya membicarakan kebijakan-kebijakan masalah umum saja karena di dalam daftar pembawa makalah ada masalah konservasi itu sendiri dan ada dari Suaka Rhino, mereka itulah yang tahu dan lebih rinci masalah-masalah kebijakan konservasi ini, oleh sebab itu dari pada salah bicara, oleh karena itu saya tidak membahasnya.

Dirman (JPWK) :

Masalah di tuliskan tiga zona peruntukan daerah konservasi ini dan apakah Bapedal sudah merestui SRS ?. Kembali di sini saya akan persilahkan di jawab oleh BKSDA ?. Mengapa demikian , pengeluaran izin wilayah pemanfaatan konservasi itu dari intansi kehutanan. Mengapa demikian !, bukan kita berarti menyetujui, walaupun pada dasarnya permasalahan ini sudah di lakukan pertemuan yang di mediasi oleh Bangda sudah selesai.

Kemudian mengenai dampak positif dan negatif, dampak ekosistem tidak dilibatkan secara nyata di sini kami membicarakan ekosistem secara menyeluruh yang tergantung dalam mata rantai ekosistem. Jadi saya hanya bisa melihat kebijakan ini hanya secara umum. Garis besarnya bahwa yang terpenting transparansi dimana kita, untuk menciptakan aturan

dan pengawasan dan ini tidak hanya tanggung jawab Bapedalda tapi tanggung jawab kita semua. Hal ini yang tidal kalah pentingnya kalau uraian Bapedal intinya sudah menyetujui study Amdalnya tetapi dari segi pencanaan pelaksanaan total dan kewenangan bukan kepada Bapedalda mungkin itu bukan salah satu pemilahan yang nantinya menjawab BKSDA, karena ada tanggung jawab koordinasi untuk lingkungan dan ada tanggung jawab pengelolaan kawasan.

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Ir. Harjanto Wahyu Sukotjo, M.Sc
Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas

1. P E N D A H U L U A N

Latar belakang

Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu Taman Nasional yang sangat kaya baik dari segi keragaman jenis maupun dari segi estetika serta keunikannya.

Oleh sebab itu Taman Nasional Way Kambas mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Propinsi Lampung khususnya, maupun pembangunan secara nasional.

Dalam era baru ini, pembangunan Kehutanan dan Perkebunan telah memprioritaskan pembangunan di bidang konservasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi paradigma pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang berorientasi kepada :

- a. Keseimbangan aspek sosial, ekologi, dan ekosistem (social, ecological dan economic benefit oriented)
- b. Bermanfaatan fungsi ganda (multi purpose forest management, atau resources based management)
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (community based management).

Dengan demikian pembangunan Taman Nasional sebagai salah satu kawasan konservasi diarahkan untuk meningkatkan peran kawasan dan sumber daya alam guna peningkatan masyarakat serta mutu kehidupan.

Konsep pembangunan Taman Nasional ini merupakan konsep pembangunan terpadu (integrated conservation development programme), yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen sumber daya alam dan ekosistemnya serta komponen masyarakat yang berada di sekitarnya guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan Taman Nasional dimaksud.

Tujuan

Pengelolaan Taman Nasional bertujuan :

1. Pemantapan pengelolaan kawasan
2. Penanggulangan terhadap segala bentuk gangguan
3. Peningkatan profesionalisme dan peran masyarakat
4. Pemberdayaan potensi
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran

1. Mewujudkan dan menjamin keberadaan (eksistensi) sumber daya alam guna
2. Mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam sesuai asas kelestarian dan optimalisme sumber daya manusia serta menjamin terbukanya peran serta masyarakat.
4. Mencegah terjadinya degradasi fungsi dan komponen lingkungan.
5. Menjamin distribusi manfaat sumber daya alam yang adil dan merata.

II. KEADAAN UMUM TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Letak dan Luas

Taman Nasional Way Kambas secara administratif pemerintahan termasuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Lampung Tengah, dengan luas kawasan \pm 130.000 ha. Kawasan ini disebelah timur dibatasi oleh sungai Way Penet, disebelah barat laut dibatasi sungai Way Pengadungan dan disebelah utara dibatasi oleh sungai Way Seputih.

Selain itu, kawasan Taman Nasional Way kambas dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman, antara lain: disebelah selatan yaitu Sukadana, Rajabasa Lama, Way Jepara, Sribawono, Labuhan Maringgai, dan kuala Penet, sedangkan disebelah barat adalah Purbolinggo, Rumbia dan Seputih Surabaya.

Secara geografis, Taman Nasional Way Kambas terletak pada $4^{\circ}37'$, Lintang Selatan $5^{\circ}16'$, Lintang Utara dan $105^{\circ}33'$ -- $105^{\circ}54'$ Bujur timur.

Keadaan Fisik

Musim kering Taman Nasional Way Kambas biasanya jatuh pada bulan April sampai Juli, sedangkan musim penghujan dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Maret. Adapun curah hujan dalam setahun rata-rata 2.000 mm.

Topografi kawasan Taman Nasional Way Kambas pada umumnya datar sampai bergelombang dengan ketinggian 0--60 m di atas permukaan laut.

Potensi

1. Flora

Taman Nasional Way Kambas kaya akan berbagai jenis flora dari berbagai tipe vegetasi. Di daerah hulu sungai Way Kanan terdapat tipe vegetasi hutan dataran rendah. Jenis-jenis hutan yang dapat dijumpai di daerah ini adalah : Meranti (*Shorea sp*), Salam (*Eugenia polyantha polyantha*), merawan (*Hopea sp.*) Minyak (*Dipterocarpus retusus*), Merbau (*Intsia palembanica*), Jabon (*Anthocephalus chinensis*), dan puspa (*Schima wallichii*). Tipe vegetasi hutan rawa ditumbuhi oleh Nibung (*Oncosperma tigilaria*), Gelam (*Melaleuca spp*), Palem Merah (*Cytostachys lakka*), Rengas (*Glutarenghas*), dan Jenis-jenis rumput rawa.

Tipe Vegetasi hutan mangrove yang di dominasi oleh jenis-jenis pohon bakau (*Avicenia spp*), *Rhizophora spp*), dan (*Brugulera spp*), Nipah (*Nipa fruticans*) dan Pandan-pandangan (*Pandanus sp*), Kemudian, tipe vegetasi hutan pantai didominasi oleh Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) dan Ketapang (*Terminalia catappa*). Selain itu, dibebberapa tempat sepanjang sungai Way Kanan dapat dijumpai sejenis liana yang mempunyai bunga seperti bunga "Kantong Semar" (*Nepentes*).

Di dalam hutan-hutan sekunder dapat dijumpai jenis-jenis Meranti (*Shorea sp*), Sempur (*Dillenia excelsa*), Puspa (*Schima wallichii*), Jabon (*Anthocephalus chinensis*) dan Rengas (*Gluta renghas*). Di daerah rawa atau daerah yang selalu basah dapat dijumpai Merbau (*Intsia palembanica*), Nibung (*Oncosperma tigilaria*), Rotan (*Calamus sp*), Padan-pandangan (*Pandanus sp*), Gelam (*Malaleuca spp*), Palem Merah (*Cytostachys lakka*), dan jenis-jenis rumput.

Selain itu terdapat tanaman reboisasi Sanobrit (*Dalbergia ensatifolia*), Lamtorogung (*Leucaena leucocephala*), Kaliandra (*Caliandra sp*), dan Jambu monyet (*Anacardium occidentale*) di daerah bekas pemukiman yang terletak di bagian tepi kawasan (zona penyangga), misalnya di Karang Sari.

2. Fauna

Berdasarkan zoogeografis (daerah penyebaran satwa), Taman Nasional Way Kambas termasuk kedalam 'oriental region' dan 'sundaic subregion' yang kaya akan jenis satwa liar. Beberapa diantara satwa liar yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas yaitu :

a. Mamalia

Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatraensis*), Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjac*), Napu (*Tragulus Napu*), Babi Hutan (*Sus scrofa*).

b. Primata

Terdapat 6 (enam) jenis primata yaitu : Siamang (*Symphalangus syndactylus*), Owa (*Hylobates moloch*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*), dan Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*)

c. Burung

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki \pm 286 jenis burung, diantaranya : Rangkong (*Bucerotidae*), Kuntul Putih (*Egreta sp*), Beo (*Gracula religiosa*), Ayam Hutan (*Gallus gallus*), pecuk (*Anhinga melanogaster*), dan Raja Udang (*Halcyon funebris*). Terdapat burung langka yang dijadikan objek penelitian yaitu bebek hutan atau itik liar (*Carina scutulata*).

3. Potensi Wisata

Selain flora dan fauna tersebut di atas, Obyek lain yang di kunjungi adalah :

a. Pusat Latihan Gajah

Pusat latihan Gajah (PLG) Way Kambas didirikan pada tahun 1985/1986 yang menempati areal seluas \pm 12 Km dari pintu gerbang Taman Nasional Way Kambas.

Pusat Latihan Gajah Way tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemecahan masalah gajah di Propinsi Lampung. Strategi pemecahan masalah gajah yang telah dilaksanakan, yaitu penggiringan dan penangkapan gajah liar (Tata Liman), pelatihan gajah (Bina Liman), serta pemanfaatan gajah bagi kehidupan masyarakat (Guna Liman). Adanya Pusat Latihan Gajah Way Kambas ini telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan di sekitar Pusat Latihan Gajah ini dapat dimanfaatkan sebagai media penelitian, Pendidikan dan rekreasi.

Gajah-gajah terlatih di Pusat Latihan Gajah Way Kambas telah dimanfaatkan untuk keperluan antara lain : (a) Gajah Tangkap, (b). Gajah Tunggang, (c). Gajah Kerja, dan (d) Gajah Atraksi.

b. Way Kanan



Dok. Alas Indonesia

merumput rusa liar yang cukup luas, dapat dicapai dengan perahu atau sampan. Sedangkan Wako merupakan padang rumput yang sangat luas sebagai habitat (tempat hidup) rusa, gajah dan burung-burung rawa. Tempat ini dapat dicapai dalam 4 jam dengan *speed boat* dari Pos Way Kanan. Dengan menyusuri sungai Way Kanan pengunjung dapat melihat-lihat berbagai tipe vegetasi yang ada di kawasan Taman Nasional Way Kambas, antara lain yaitu : tipe vegetasi hutan dataran rendah, tipe vegetasi hutan rawa, tipe vegetasi hutan mangrove dan tipe vegetasi hutan pantai.

Way Kanan merupakan objek wisata alam yang mempunyai kondisi lingkungan alam yang relatif masih asli berupa hutan alam primer (hutan tropis dataran rendah). Potensi wisata alam di Way Kanan diperkaya dengan adanya sungai Way Kanan yang mengalir menuju pantai atau laut. Dengan menyusuri sungai ini dapat dicapai tempat-tempat seperti Kali Biru dan Wako. Kali Biru merupakan tempat

Disamping berbagai jenis tumbuhan, di Way Kanan juga dapat dijumpai berbagai jenis stwa liar, antara lain dari kelompok mamalia (binatang menyusui), primata (kera) dan aves (burung-burung). Yang menarik di kawasan ini terdapat satu jenis burung yang sangat langka yaitu Itik Liar (*Carina scutulata*).

4. Permasalahan

a. Gangguan Kawasan

Gangguan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas antara lain kebakaran hutan sering terjadi di RKPA Bungur, RKPA Susukan Baru, RKPA Palang Hijau dan RKPA Kuala Penet. Kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997/1998 di lahan gambut dalam wilayah RKPA Waya Kanan dan Kuala Kambas. Gangguan kawasan berupa ancaman penyerobotan lahan terjadi di RKPA Kuala Penet pada awal tahun 1999 sebanyak 9 parit dimana masing-masing parit tersebut lebarnya ± 5 km dan panjangnya ± 5 km.

Penggembalaan liar (melepaskan hewan peliharaan didalam kawasan Taman Nasional) juga merupakan salah satu gangguan terhadap kawasan. Penggembalaan ini ditemui pada saat musim kemarau antara bulan Agustus sampai dengan bualan Desember, seluas 600 ha di RKPA Kuala Penet dan RKPA Bungur.

Selama musim ikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, dijumpai pemukiman nelayan bersifat sementara di Kuala Kambas, Sekapuk dan Wako seluas \pm 8 ha. Keberadaan pemukim ini secara legalitas tidak terkait dengan pengelolaan Balai Taman Nasional Way Kambas. Mereka akan meninggalkan tempat tersebut pada saat musim ikan berakhir.

Ancaman pencurian hasil hutan antara lain berupa : pencurian nibung, ikan air tawar dan burung sering terjadi di RKPA Kuala Penet, RKPA Cabang, RKPA Wako dan RKPA Kuala Kambas. Frekwensi kejadian rata-rata 2 – 5 kali pertahun.

Kegiatan perburuan liar antara lain terhadap jenis : babi hutan, rusa, kijang terdapat di RKPA Susuakan Baru, RKPA Bungur, RKPA Cabang, RKPA Kuala Penet dan RKPA Plang Hijau dengan frekwensi tertinggi 5 kali pertahun dan jumlah tertinggi sebanyak 12 ekor, sering terjadi antara bulan Juli sampai dengan Nopember. Kejadian perburuan rusa tertinggi terjadi di RKPA Wako antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Penjeratan harimau ditemui di RKPA Cabang pada bulan Juli dan bulan Agustus 1998 dan bulan Juli 1999, kasus ini belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Ancaman lain adalah berupa penebangan liar terhadap jenis : gelam, nibung, gaharu dan rengas. Frekwensi penebangan sebanyak 4--10 kali pertahun, terjadi antara bulan Maret samapi dengan September di RKPA Kuala Penet, RKPA Bungur, RKPA Cabang, RKPA Susukan Baru dan RKPA Plang Hijau. Penebangan gaharu merupakan ancaman serius karena jumlah pelaku bisa mencapai 12 orang perkelompok, dilakukan setiap saat dalam 1 tahun, pelaku sebagian besar bersal dari luar wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, dan dapat mengambil jenis apapun didalam kawasan jika tidak memperoleh gaharu.

Pelaku gangguan terhadap kawasan semuanya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi hukum.

b. *Kondisi Biophysik*

Luas wilayah dengan batas alam (sungai dan pantai) sepanjang 202.959,59 m dan batas buatan 29.407,55 m keanekaragaman hayati yang tinggi, aksesibilitas umum yang terbatas, belum dikukuhkannya luas kawasan hasil rekontruksi tata batas tahun 1997, dan belum di SK - kannya usulan/revisi Zonasi Taman Nasional, menyebabkan belum dapat diantisipasi intensitas gangguan terhadap kawasan yang tinggi.

- c. Keberadaan 33 desa pra sejahtera pada 6 wilayah kecamatan di sekitar kawasan, sebagian besar mata pencaharian penduduk berupa bertani sawah atau ladang pada lahan yang tetap, masih kurangnya sarana transportasi dan mobilitas bahan produksi, dan tingginya

tingkat gangguan gajah serta tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk yang masih rendah menyebabkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah menyebabkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah sehingga potensi konflik terhadap sumber daya alam bertambah besar.

- d. Kualitas dan kuantitas tenaga baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, tenaga LSM, maupun anggota masyarakat dirasakan masih belum mencukupi dan seimbang dengan tuntutan pengembangan pengelolaan Taman Nasional. Kondisi ini juga diakibatkan karena kurangnya pendidikan maupun pelatihan guna meningkatkan ilmu dan pengetahuan, disamping keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas serta dana untuk kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan.

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

A. Misi Pengembangan Taman Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, telah disusun program-program sesuai dengan konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Pengelolaan Taman Nasional diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis masyarakat.

Misi yang diemban Taman Nasional dalam pengelolaannya mencakup tiga hal yaitu :

1. Perlindungan sistem Penyangga Kehidupan.
2. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya.
3. Pemanfaatan secara lestari.

Ketiga hal dimaksud, merupakan acuan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Taman Nasional.

Dengan demikian pembangunan taman nasional diharapkan dapat mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat.

B. Misi Pengembangan Taman Nasional

Program-program diarahkan sesuai kebijaksanaan strategis dalam upaya memantapkan peran kawasan sesuai fungsinya dan meningkatkan manfaat serta guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada era globalisasi pada millenium yang akan datang.

1. Program Pemantapan Status Kawasan
Upaya ini bertujuan memantapkan keberadaan suatu kawasan Taman Nasional secara jelas baik dari segi hukum maupun fisik kawasannya.
2. Program Penataan Kawasan
Sesuai dengan tujuan dan konsepsi pengelolaan Taman Nasional, dilakukan penataan kawasan.
Penataan kawasan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan ruang dengan mempertimbangkan faktor potensi dan fungsi. Bentuk penataan kawasan ini berupa pembagian zonasi di Taman Nasional.
3. Program Pemantapan Pengelolaan
Kinerja yang baik dalam suatu pengelolaan kawasan merupakan tuntutan jaman, terutama dalam menyongsong era globalisasi yang sedang dan akan dihadapi.
Untuk maksud tersebut pemantapan pengelolaan melalui profesionalisme sumber daya manusianya perlu didukung pula baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Lebih lanjut perencanaan yang baik merupakan kunci utama dalam upaya pemantapan pengelolaan.
4. Program Pembinaan Potensi
Dalam upaya optimalisasi fungsi, pembinaan potensi sangat diperlukan baik kegiatan yang menyangkut survey dan identifikasi maupun perlindungan jenis dan ekosistem serta pembinaan / recovery / regenerasi / Rehabilitasinya.
Dengan demikian peranan potensi yang ada dapat tetap terjaga dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.
Disamping potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat disekitar kawasan merupakan salah satu program dalam upaya partisipasi masyarakat.
Didalam pengelolaan kawasan
Oleh sebab itu komponen masyarakat disini merupakan salah satu aspek yang dibina sesuai konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.
5. Program Pengembangan potensi
Dalam upaya mendukung pelestarian secara optimal fungsi kawasan serta manfaatnya pengembangan potensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas, sehingga manfaat baik langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan dan diakses masyarakat luas.
Pengembangan potensi ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat serta memotifasi kepedulianya terhadap sumber daya alam dan eksistensinya disamping pengembangan potensi sosial budaya yang ada.

Program pengembangan potensi ini mencakup kegiatan-kegiatan :

- a. Pengembangan wisata alam
 - b. Pengembangan daerah penyangga
 - c. Pengembangan adat dan budaya
 - d. Pengembangan kerajinan rakyat
 - e. Pengembangan penelitian
6. Program Pemberdayaan Masyarakat
Kemitraan merupakan salah satu kunci dalam pengelolaan Taman Nasional oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung kerjasama dalam berbagai kegiatan yang ada.
Pemantapan kelembagaan serta pelatihan merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat disamping akses termasuk informasi yang di perlukan.
7. Program Pemantapan Pengamanan Hutan
Dalam upaya pengamanan hutan ditekankan pada kesadaran masyarakat melalui tindakan preventif seperti kegiatan penyuluhan, patroli, simpatik, pelatihan serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait serta masyarakat di sekitar kawasan.
Tindak represif dilaksanakan sesuai dengan prosedur baku yang telah di tetapkan secara lugas, tegas dan transparan.
Pemantapan pengamanan hutan dilakukan pula dengan meningkatkan kemampuan personil Polisi Hutan. Terkait dengan hal tersebut di atas upaya pemantapan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional telah di prioritaskan.
8. Program Monitoring dan Evaluasi
Dalam suatu pengelolaan diperlukan monitoring dan evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam upaya pengelolaan Taman Nasional.

PENUTUP

Semoga makalah ini dapat memberikan gambaran yang berkaitan dengan tujuan, sasaran serta misi yang diemban dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas.

Dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Way Kambas telah dijabarkan dalam program yang diharapkan dapat meningkatkan peran kawasan dalam memenuhi fungsinya dan meningkatkan manfaat dalam upaya mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Harapan kami semiloka ini dapat memberikan masukan dalam upaya penyempurnaan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas.

DISKUSI

Materi:

Konsep pembangunan TNWK merupakan konsep pembangunan terpadu yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen SDA dan Ekosistemnya serta Komponen masyarakat yang berada disekitar guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan Taman Nasional tersebut.

Selain fenomena flora dan fauna di TNWK terdapat rawa yang juga berpotensi kuat untuk wisata dan pembangunan di Propinsi Lampung namun terdapat juga kendala atau permasalahan seperti gangguan kawasan, kondisi Biofisik, konflik terhadap SDA serta kuantitas dan kualitas Taman Nasional tersebut.

Dalam rangka mengembangkan TNWK yang bermanfaat ganda baik kawasan konservasi dan lingkungan sekitar dan misi yang diemban berkaitan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa tumbuhan serta ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari contohnya Eco-tourism yang tidak hanya orang sekedar melihat dan membayar tetapi yang lebih penting bisa memahami dan mengerti apa itu konservasi.

Diskusi Tanya Jawab

Penanya :

1. Ali Kabul (Unila) :

- Masalah Pemantapan status Zona
- Penangkalan banyak Pro Kontra dan bagaimana efek dengan satwa lain
- Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dan Managemennya
- Memanfaatkan Fungsinya baru kembangkan kehallainnya (rekomendasi)

2. Edi K (JPWK) :

- Atas Dasar Hukum Apa Persetujuan Program EkoTourisme

3. Yanto (JPWK) :

- Apa Komentar Bapak selaku Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas tentang Keberadaan SRS di TNWK dari sisi Positif dan Negatif ?

Jawab :

1. Ali Kabul (Unila) :

- Penataan ruang dalam bentuk Zona belum ada SK-nya hingga saat ini. Namun sebelumnya Perlakuan Zona telah dilakukan yang memang perlu pengkajian ulang.

- Timbul pemikiran baru di Way Kambas tempat penangkaran yang In-Situ dan sekarang yang akan di upayakan
- Banyak kendala karena terkait dengan pemahaman masyarakat, kondisi sosial ekonomi, dan usaha yang ada saat ini seperti memberikan muatan lokal masalah konservasi, merekrut masyarakat dengan memberi perbekalan, kaitannya dengan Taman Nasional untuk patroli.

Selanjutnya tidak terjawab karena habis waktu .

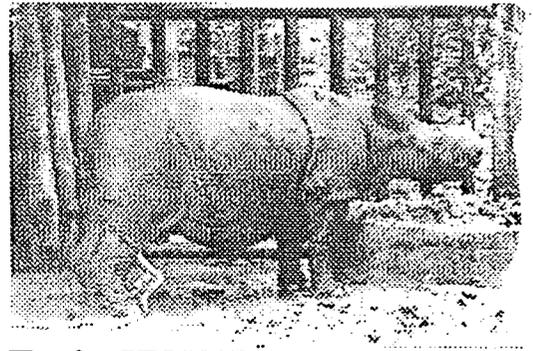
PROYEK SUAKA RHINO SUMATERA

Tony Sumampau
Taman Safari Indonesia

Di dunia ini terdapat 5 species badak, yaitu 2 species terdapat di Afrika badak Hitam (*Diceros bicornis*) dan badak putih (*Ceratotherium simum*), 1 species di India yaitu Badak India (*Rhinoceros unicornis*) dan 2 species berada di Asia Tenggara yaitu badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*).

Badak Jawa hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon Walaupun jumlah populasinya terkecil diantara badak lainnya (\pm 50--60 ekor) namun dalam kurun waktu 30 tahun terakhir memiliki jumlah yang stabil. Lain halnya dengan badak Sumatera, akibat adanya eksploitasi hutan, konversi lahan hutan untuk perkebunan, pertanian, industri, pemukiman dan perburuan liar menyebabkan populasinya sangat terancam, hasil survey pada tahun 1991 jumlah badak Sumatera diperkirakan 400 ekor, tetapi pada tahun 1993 penurunan sangat drastis diperkirakan hanya tinggal sekitar 185 ekor (PHPA workshop, 1993).

Sejak tahun 1984 lembaga dunia telah memberikan perhatian terhadap konservasi badak Sumatera, sehingga disimpulkan bahwa untuk menyelamatkan satwa langka ini harus dilakukan penangkaran badak secara ek-situ disamping pengamanan habitat badak di Sumatera. Maka untuk itu dilakukan penangkapan atas "Dome Animal" satwa yang habitatnya terjepit oleh eksploitasi hutan sehingga keberadaannya terpecah-belah, kemudian dipelihara di kebun-kebun



Dok. JPWK

binatang di dalam maupun di luar negeri. Penangkapan dilakukan sebanyak 18 ekor, dimana 1 ekor mati saat penangkapan, 6 ekor dikirim ke kebun binatang di Amerika, 3 ekor ke Howlett, Inggris, sedangkan sisanya di kebun binatang Ragunan, Surabaya dan Taman Safari Indonesia.

Sampai tahun 1994 Badak hasil tangkapan sebanyak 17 ekor tersebut akhirnya mati sebanyak 12 ekor tanpa diketahui penyebabnya dari hasil otopsi hanya dapat diduga kematian diakibatkan oleh kegagalan pencernaan karena pemberian jenis makanan yang tidak sesuai. Akhirnya pada tahun 1994 TSI, IRF, PHPA dan YMR memutuskan agar sisa badak yang masih hidup untuk dilestarikan secara In-situ dengan mengembalikan ke habitat alamnya dan kemudian dipilih Taman Nasional Way Kambas. Dipilihnya Taman Nasional Way Kambas karena diduga kawasan tersebut adalah habitat badak dan berdasarkan hasil foto kamera infra merah tim Sumatera Tiger Project yang tanpa sengaja

telah memotret beberapa ekor badak sumatera. Dengan adanya foto-foto badak Sumatera tersebut. Maka atas seizin Menteri Kehutanan dan perkebunan dan Gubernur KDH TKI Lampung maka dibuatlah kawasan Suaka Rhino Sumatera di Taman Nasional Way Kambas dengan pengelolaanya diserahkan kepada Taman Safari Indonesia.

Untuk pengelolaan konservasi badak secara in-situ bukan saja membutuhkan pengelolaan yang profesional tetapi juga membutuhkan dana yang cukup banyak, sedangkan untuk mendanai konservasi in-situ badak Sumatera di Way Kambas selama ini mengandalkan donatur yang dihimpun oleh IRF dari donatur luar negeri dan Yayasan Mitra Rhino untuk donatur dalam negeri serta TSI dan PHPA sebagai pengelolaan Taman Nasional maka untuk mendanai proyek penyelamatan badak Sumatera jangka panjang timbul gagasan untuk mendirikan eko-wisata (eko-tourisme) pada zona pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas, sesuai dengan rekomendasi hasil PHPA workshop badak Sumatera pada tahun 1993.

Dengan adanya Pengelolaan Pariwisata Alam (PPA) SRS diharapkan dari hasil usaha eko-wisata ini akan dapat mendanai konservasi badak Sumatera yang sangat terancam keberadaanya. Dengan demikian pula pengelolaan konservasi badak sumatera tidak tergantung ada donatur dan pengelolaanya dapat secara mandiri. Apabila usaha ini dapat berhasil, maka PPA ini merupakan contoh untuk pengelolaan usaha konservasi lainnya di wilayah negara Indonesia.

DISKUSI

Ivan (JPWK) :

Ada kesalahan tentang izin artinya tidak ada upaya kedaerah keterlibatan Steak Holder
Bagaimana tanggapan dari bapak ?

Dirman (JPWK) :

1. Saya lihat dari pernyataan bapak hanya menebus dosa ancaman dari kepunahan badak. Ada beberapa hal perlu dicermati dalam pelaksanaan penangkaran badak belum ada yang berhasil meningkatkan populasi, saya mengusulkan bagaimana kalau badak itu dilepaskan ke alam saja, kalau itu ancaman dari luar maka harus dibina masyarakatnya.
2. Sehubungan dengan adanya TSi dalam pelaksanaan Ekotourism melakukan penangkaran Badak di Way kambas alasan pernah ada Badak, tetapi menurut saya karena badak itu telah dijadikan alat komoditas, kalau saya lihat skema gambar penangkaran ada pembagian dari tahap I,II,III,dan IV itu makin memperluas bagaimana tanggapan bapak !

Verry (JPWK) :

1. Konsep SRS yang dipikirkan kami konsep konservasi in situ, kalau konsep konservasi insitu seperti itu adalah tidak demikian, ini terdapat didalam SK juga MoU dengan SRS sendiri bagaimana bisa SRS bisa mendapat izin 900 ha di Way kambas padahal SK itu belum keluar. Kalau dasar kami melakukan kajian apakah pembangunan itu dampak lingkungannya harus mempunyai AMDAL, SRS ada di Taman Nasional tetapi kenapa tidak ada AMDAL, Karena menurut kami suatu yang menimbulkan dampak lingkungan harus menggunakan AMDAL.
2. Ada dua kesalahan yang saya lihat sistem pengajuan zonasi SRS, kok bisa merubah sistem zonasi yang diajukan oleh Taman Nasional, mengapa ini terjadi ?

Jawab :

Bahwa kami memang pada awalnya tidak ada kerjasama dengan beberapa LSM di Lampung tapi dengan Pemda kami sudah melakukan berulang-ulang untuk melakukan konservasi badak ini, jadi pada saat itu kami belum masuk kedalam LSM, alasan kami karena kondisi saat itu dibutuhkan penanganan segera badak tersebut. Sedangkan untuk pengambilan lokasi Way kambas pada awalnya dimana dihutan-hutan banyak ditebang-tebangi untuk perkebunan ternyata ada badak dan kami mulai berpikir bagaimana melakukan penangkaran in-situ. Memang usaha ini ada berhasil dan ada yang tidak berhasil, tetapi kami ada keinginan mempunyai pengalaman penangkaran badak secara langsung di Taman Nasional. Menyambung pertanyaan Pak Dirman in-situ dilakukan dengan secara alami pada dasarnya kami belum bisa dilakukan karena hampir 10 tahun badak-badak yang

kita tangkarkan berasal dari negara lain dan itu perlu proses rehabilitasi dan dalam pelaksanaannya kami mempunyai 2 ekor betina dan 1 ekor jantan dengan harapan perkawinan terjadi dan mendorong untuk mempunyai keturunan yang dapat dikembalikan ke alam. Masalah Ekotourism yang kami ajukan kami mohon ke Menteri dan selanjutnya diserahkan ke Dirjen dan itu disepakati dengan SRS. Sedangkan Masalah keterlibatan masyarakat bahwa kami telah melakukannya yang mana tulang punggung dari kegiatan penangkaran badak sebagai contoh keepers-keepers itu dari masyarakat sedangkan mekanis. corator, masih dari Bogor, jadi ini suatu awal keterlibatan masyarakat tetapi pada dasarnya TSI berusaha melakukan keikutsertaan masyarakat dengan melakukan dengan aspek budayanya juga mengenai zonasi kami melihat 9000 Ha zona lainnya melihat satu kesatuan dimana populasi badak yang ada jadi kami tidak melihat ekosistem secara sendiri (terpisah-pisah).

Edi Karizal (JPWK) :

Kalau melihat makalah ekowisata yang bapak katakan sangat berbeda dengan konsep dan itu ada kejanggalan yaitu usulan yang dilakukan SRS untuk ekowisata kalau 823 Ha dalam perencanaan zonasi itu hanya 124 ha artinya 100-an ha bukan di zona pemanfaatan tetapi diambil dari zona pemanfaatan khusus artinya secara hukum ini menyalahi aturan saya melihat indikasi mengabaikan pendekatan diatas saja, karena jelas didalam peraturan 18/94 pasal 4 menyatakan zona pemanfaatan tidak merusak bentang alam.

Hazairin (JPWK) :

Taman Safari melihat kegiatan penangkaran karena kepentingan uang, tetapi saya melihat untuk kepentingan uang, karena untuk konservasi badak perlu biaya besar dan pengembangan wilayah konservasi akan menyedot pariwisata yang akan datang kesana, bagaimana tanggapannya ?

Mengenai penggunaan Elektrik fan menurut kami tidak baik karena menurut logika saya badak punya wilayah 50.000 ha dikurung 100 ha yang menggunakan alat setrum 6000 Watt ini akan mengganggu badak liar yang diluar untuk datang dan tidak dapat ereksi.

Jawab :

Saya mengkoreksi jawaban ekowisata di Kuala Way Kambas yang 100 ha menjadi 10 ha itupun tidak ada bangunan tetapi sebagai Buffer PPA yang ingin datang ke alam. Masalah tinggi sekali biaya badak memang awalnya perlu besar tapi pada dasarnya kami mendapat masukan uang dari donatur IRF dan PHPA dan menurut saya tidak hanya propit yang ditonjolkan dan kami melakukan proses AMDAL nya sesuai dengan bentuk alam jadi bukan bentuk hotel berbintang lima.

17 ekor memerlukan biaya 20 juta/bulan ini tidak terlalu besar dan penggunaannya dananya untuk seluruh aktivas disana. Mengenai penggunaan Elektrik fan bahwa, itu bukan bukan barang yang baru tetapi pernah digunakan juga di PLG dan sebenarnya tidak menakutkan dan tidak berbahaya dan ini sama dengan kabel busi 1200 Watt itu hanya sebagai pencegahan dan juga untuk pencegahan supaya orang-orang tidak masuk kedalam kawasan dan tegangan ini sering berubah-ubah karena menggunakan solar. Tambahan

dari Bapak Hutabarat masalah perlindungan in-situ yang berbasiskan masyarakat yang ditanyakan Dirman, bahwa pada dasarnya sudah melaksanakan dimana tiap-tiap unit terdapat 1 Jagawana dan 3 masyarakat yang melaksanakan pengamanan badak dengan patroli dan juga mencegah kerusakan-kerusakan berat dan RPU ada 15 Unit RPU 3 Way kanan, 6 TNBBS, 7 Ujung Kulon, dan 3 TN. Kerinci Seblat, dan tiap-tiap RPU ini didukung oleh koordiantor lapangan.

**PROGRAM KONSERVASI
BADAK SUMATERA (*Dicerorhinus sumatrensis* Fischer, 1814)
di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Tengah.**

**Drs. Haerudin R. Sadjudin
Yayasan Mitra Rhino**

Ringkasan

Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) adalah salah satu dari lima jenis badak yang merupakan mamalia besar paling terancam punah. Di Sumatera saat ini populasinya diperkirakan hanya tinggal 213-285 ekor yang tersebar di 17 lokasi yang terpisah (Ditjen PHPA dan YMR, 1994). Di Taman Nasional Way Kambas populasinya diperkirakan hanya ada sekitar 15-24 ekor (*Sumatran Tiger Project*, 1998), oleh karena gangguan habitat dan perburuan badak di kawasan konservasi lainnya di Sumatera masih terus berlangsung.



Dok. STP Way Kambas

Sehingga diperlukan suatu program terpadu konservasi badak Sumatera yang berbasis masyarakat di Taman Nasional Way Kambas.

Program Konservasi badak Sumatera terpadu di Taman Nasional Way Kambas yang berbasis Masyarakat perlu diterapkan berdasarkan kajian yang mendalam agar penerapannya dapat berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar Taman Nasional guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Diperkirakan Taman Nasional Way Kambas akan menjadi benteng terakhir populasi badak Sumatera; jika konservasi terpadu berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan tepat.

Diharapkan penyampaian makalah ini dapat bermanfaat untuk melaksanakan konservasi terpadu badak Sumatera di Taman Nasional Way Kambas yang berbasis Masyarakat.

Pendahuluan

Dahulu badak Sumatera dapat dijumpai mulai dari kaki pegunungan Himalaya di Bhutan dan India Timur, menyebar ke seluruh Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan semenanjung Malaysia (Sajudin, 1980). Di Indonesia dapat dijumpai di pulau Sumatera dan Kalimantan. Jumlah badak Sumatera yang masih dapat bertahan hidup saat ini diperkirakan kurang dari 500 ekor dan tersebar pada lebih dari 35 lokasi di Indonesia dan Malaysia (AsRSG-SSC/IUCN, 1998). Di Indonesia (Sumatera) badak Sumatera diperkirakan hanya tinggal 213-285 ekor yang tersebar di 17 lokasi termasuk beberapa Taman Nasional di pulau Sumatera antara lain Taman Nasional Gunung Leuseur, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Way Kambas (Ditjen PHPA dan YMR, 1994).

Adanya badak Sumatera di Taman Nasional Way kambas baru dipastikan pada tahun 1993, setelah mahasiswa *Universitas Southamton* mencetak dua ukuran jejak induk dan anak badak Sumatera, diperkirakan pada saat itu ada 5 ekor badak di Way Kambas.

Namun sejak pemasangan kamera trap tahun 1997 di Taman Nasional Way Kambas populasinya diperkirakan ada sekitar 15-24 ekor (*Sumatran Tiger Project*, 1998) Jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dalam 10 tahun terakhir ini, para ahli memperkirakan telah terjadi penurunan jumlah badak Sumatera lebih dari 50 %. Penyebab utamanya adalah akibat banyaknya kegiatan perburuan liar dan perusakan hutan sebagai habitatnya.

Badak bukan hanya milik Indonesia saja, akan tetapi sudah menjadi perhatian International. Oleh karena itu menghentikan berbagai bentuk ancaman terhadap pelestarian badak merupakan tanggung jawab kita bersama. Pelestariannya memerlukan partisipasi banyak pihak, terutama keterlibatan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tempat badak.

Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas ditetapkan pada 1 April 1989 dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 14/Menhut-II/1989, memiliki luas areal sekitar 130.000 hektar. Selain kegiatan pengamanan yang ketat, di Way Kambas telah ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk melaksanakan program konservasi.

Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun faunanya. Hutan hujan dataran rendah ini memiliki beberapa tipe ekosistem antara lain tipe hutan hujan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove hingga hutan rawa, baik itu hutan rawa air tawar maupun hutan rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut serta musim hujan dan kemarau.

Way Kambas ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa pada tahun 1980, dan ditinggalkan oleh kegiatan pembalakan dari suatu HPH pada tahun 1970. Way Kambas ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1989, saat ini tidak dijumpai hutan primer utuh dari suatu ekosistem hutan hujan dataran rendah yang asli, sehingga di beberapa tempat sangat rawan dan sering terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan hampir terjadi setiap musim kemarau, terjadi terutama pada daerah yang ditumbuhi alang-alang dan semak belukar campuran dari tumbuhan pionir, juga di rawa-rawa tadah hujan yang pada musim kemarau menyimpan akar gambut dan serasah yang kering sehingga sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran hutan.

Penyebab kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas selain faktor alam dan faktor vegetasi juga bisa dikarenakan faktor manusia, dengan banyaknya pengunjung yang memasuki daerah Taman Nasional di Way Kambas menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sehingga perlu ditinjau dari manajemen pengelolaan Taman Nasional tersebut.

Program konservasi

Kegiatan-kegiatan penelitian dan konservasi badak Sumatera dan satwa lainnya tersebut diduga cukup berpengaruh terhadap lingkungan lainnya sebagai pendukung suatu ekosistem. Seringnya terjadi kebakaran hutan pada setiap musim kemarau di beberapa tempat diduga berpengaruh terhadap sebaran dan daerah jelajah badak dan satwa lainnya, sehingga dua hal penting yang mempengaruhi status kondisi badak dan satwa lainnya sebagai pendukung suatu ekosistem serta perubahan-perubahan (suksesi) secara ekologis ini diperlukan adanya suatu kegiatan pemantauan secara ilmiah dan berkelanjutan secara simultan pada kondisi dua musim (penghujan dan kemarau). Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendukung kondisi kelangsungan hidup (kelestarian) badak Sumatera di kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas.

Hasil kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu terjadinya suatu perubahan paradigma baru mengenai pengelolaan (manajemen) yang lamban, terlalu birokratis, kurangnya informasi, sulitnya koordinasi, kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat setempat menjadi satu perubahan nuansa yang ada ke arah yang lebih profesional. Oleh karena itu perlu adanya program konservasi badak Sumatera berbasis masyarakat di Taman Nasional Way Kambas Bandar Lampung ini yang akan segera dapat dilaksanakan dengan program antara lain :

- A. Manajemen habitat dan populasi**
- B. Manajemen kawasan taman nasional**
- C. Manajemen pendukung lainnya**
- D. Manajemen partisipasi masyarakat**
- E. Manajemen sosialisasi**

A. Program manajemen habitat dan populasi

- 1) Menginventarisasi populasi dan habitat badak Sumatera dan satwa liar lainnya yang ada di Taman Nasional Way Kambas dengan harapan mendapatkan data populasi dan habitat yang akurat di kawasan tersebut sehingga nantinya akan dapat merencanakan kegiatan konservasi badak Sumatera terpadu berbasis masyarakat di Taman Nasional Way Kambas yang lebih baik.
- 2) Mengadakan kegiatan pemetaan penyebaran populasi dan habitat badak Sumatera dan satwa liar lainnya yang ada, menghasilkan data kondisi penyebaran populasi dan habitat satwa liar tersebut di Taman Nasional Way Kambas.
- 3) Mengetahui daerah jelajah (*home range*) dan data ancaman terhadap badak Sumatera yang akhirnya menghasilkan informasi daerah jelajah dan data identifikasi ancaman terhadap aktifitas badak Sumatera.
- 4) Monitoring populasi dan habitat badak Sumatera dan satwa liar lainnya yang ada di Taman Nasional Way Kambas yang nantinya dapat mengetahui kepastian kondisi populasi dan habitat satwa liar tersebut yang ada di Taman Nasional Way Kambas.
- 5) Studi sosial behaviour badak Sumatera dan satwa liar lainnya dengan harapan dapat menghasilkan kepastian kondisi sosial dan behaviour yang ada di sekitar Taman Nasional Way Kambas.
- 6) Pendidikan dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan petugas lapangan, mahasiswa dan masyarakat tentang manajemen habitat dan populasi badak Sumatera dan satwa liar lainnya di Taman nasional Way Kambas.

B. Program manajemen kawasan taman nasional

- 1) Mengadakan kegiatan tata batas atau zonasi dan zona pemanfaatan sehingga menghasilkan data kepastian tata batas dan data tata batas pemanfaatan di wilayah Taman Nasional Way Kambas.
- 2) Memantau keadaan lingkungan di wilayah Taman Nasional Way Kambas guna mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi ekosistem.
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan ekoturisme yang akhirnya dapat mengembangkan ekowisata yang berbasis masyarakat dan sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional.
- 4) Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan Petugas, Sarjana dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang management Taman Nasional.

C. Program manajemen pendukung lainnya

- 1) Mengadakan kegiatan penaksiran terhadap habitat dan populasi (primata, ungulata/gajah, burung, dan carnivora) yang ada di kawasan Taman Nasional Way Kambas sehingga mendapatkan taksiran informasi tentang habitat dan populasi yang ada.
- 2) Memonitoring interaksi badak terhadap mamalia besar dan masyarakat terhadap Taman Nasional guna mendapatkan data interaksi badak terhadap mamalia besar dan masyarakat di Taman Nasional Way Kambas.
- 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya masyarakat setempat (lokal) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka di bidang manajemen pendukung konservasi badak.

D. Program manajemen partisipasi masyarakat

- 1) Mengadakan kegiatan sosialisasi konservasi badak terhadap masyarakat guna meningkatkan persepsi dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan konservasi khususnya badak Sumatera.
- 2) Pembentukan jaringan kerja diantara institusi terkait yang akhirnya menghasilkan terbentuknya jaringan kerja dengan pihak yang terkait dan peduli
- 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang partisipasi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap konservasi.

E. Program manajemen sosialisasi (semiloka)

Menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi hasil kegiatan konservasi di Taman Nasional Way Kambas sehingga masyarakat mengerti tentang kegiatan konservasi tersebut.

Matriks program dan kegiatan yang tawarkan untuk dikerjakan di Taman Nasional Way Kambas

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Instansi terkait
1	Manajemen habitat dan populasi	Inventarisasi populasi	Data populasi	YMR, IPB, TN
		Inventarisasi habitat	Data habitat	YMR, IPB, TN
		Pemetaan peyebaran	Kondisi peyebaran	YMR, IPB, TN

		<i>Home range</i>	Informasi daerah jelajah	YMR, IPB, TN
		Ancaman terhadap badak	Data identifikasi ancaman	Taman Nasional (jagawana)
		<i>Monitoring populasi</i>	Kepastian kondisi populasi	YMR, IPB, TN, JPWK, Unila
		<i>Monitoring habitat</i>	Kepastian kondisi habitat	YMR, IPB, TN, Unila, JPWK
		Studi sosial <i>behaviour</i>	Kepastian kondisi sosial dan <i>behaviour</i>	Unila, IPB
2.	Manajemen kawasan taman nasional	Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen habitat badak	YMR, IPB, TN JPWK, Pemda
		Tata batas/ zona	Kepastian tata batas dan zonasi	YMR, IPB, TN
		<i>Buffer zone</i>	Kepastian atas manfaat di <i>buffer zone</i>	YMR, IPB, TN

		<i>Monitoring lingkungan</i>	Mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi di ekosistem	YMR,IPB,TN
		<i>Ekoturisme</i>	Berkembangnya ekowisata yang berbasis masyarakat sesuai dengan daya dukung masyarakat	YMR, IPB, TN, Pemda
3.	Manajemen pendukung lainnya	Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen taman nasional	YMR, IPB, TN, Pemda
		Taksiran habitat & populasi (primata, ungulata & gajah, burung, carnivora	Data taksiran populasi dan habitat, primata, ungulata & gajah, burung, carnivora	YMR, IPB, TN, Unila, Pemda
		Interaksi badak terhadap mammalia besar lainnya	Data kondisi interaksi badak terhadap mammalia besar	YMR, IPB, Unila, Pemda
		Interaksi masyarakat terhadap taman nasional	Data kondisi interaksi masyarakat terhadap taman nasional	TN, JPWK

		Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan SDM terhadap manajemen pendukung konservasi badak	YMR, IPB, TN Unila, Pemda
4.	Manajemen partisipasi masyarakat	Sosialisasi konservasi badak	Meningkatkan persepsi dan partisipasi aktif masyarakat	YMR, JPWK, TN, Pemda
		Pembentukan jaringan kerja	Terbentuknya jaringan kerja pada pihak yang terkait dan peduli	JPWK, Unila, TN, YMR, IPB, Pemda
5.	Program Sosialisasi (semiloka)	Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap konservasi	YMR, IPB, TN, Unila, Pemda, JPWK
		Sosialisasi evaluasi kegiatan	Sosialisasi dan publikasi hasil kegiatan konservasi di Taman Nasional Way Kambas.	YMR, IPB, TN, Unila, Pemda, JPWK

Penutup

Diharapkan makalah yang merupakan suatu gagasan untuk dapat mengerjakan program dan kegiatan konservasi Badak Sumatera terpadu berbasis masyarakat di Taman Nasional Way Kambas ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pengembangan manajemen konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Sehingga penyelamatan Badak Sumatera yang sudah terancam punah paling tidak dapat dilaksanakan di Taman Nasional Way Kambas secara tepat dan berbasis masyarakat. Program dan kegiatan konservasi Badak Sumatera khususnya, maupun satwa liar lainnya di Taman Nasional Way kambas dapat dirasakan manfaatnya bagi semua masyarakat yang ada di sekitar kawasan taman nasional.

Daftar Pustaka

1. *AsRSG-SSC/IUC. Asian Rhino Action Plan*. Gland. 1998.
2. Ditjen PHPA dan YMR . *Strategi Konservasi Badak Indonesia*. Bogor. 1994.
3. MAPEKA-Universitas Kristen Maranatha. *Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis* FISCHER, 1814) di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Tengah*. Bandung. 1999.
4. Sajudin H.R. *Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis* FISCHER, 1814)*. Sekripsi Sarjana Muda Universitas Nasional. 1980.

DISKUSI

Materi

Kegiatan Penelitian dan Konservasi Badak Sumatra sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar sebagai pendukung Ekosistem. Dua hal penting yang mempengaruhi status kondisi Badak sebagai pendukung suatu ekosistem serta suksesi secara ekologis.

Diskusi Tanya Jawab :

Penanya :

1. Panji (JPWK) :
 - Mengenai Matrik Kegiatan, apakah sudah ada koordinasi antara pihak YMR dengan JPWK
2. Erna (Proyek Pesisir) :
 - Mengenai tanggung jawab konservasi dan Rekomendasi agar dasar konservasi memperhitungkan secara keseluruhan antara gajah, harimau, badak, atas suatu ekosistem
3. (JPWK) :
 - Wewenang TN dilibatkan atau tidak untuk pengembangan ke depan
4. Bapedalda TK II Lampung Timur :
 - Mengenai jumlah badak di TNWK yang berbeda-beda

Jawab :

1. Panji (JPWK) :
 - Matrik tersebut baru suatu usulan yang mempunyai gerak untuk membantu konservasi
2. Erna (Proyek Pesisir) :
 - Tanggung Jawab pengembangan Konservasi secara bersama-sama.
3. (JPWK) dan Bapedalda TK II Lampung timur:
 - Wewenang dan Tanggung Jawab ada ditangan kita semua
 - Jumlah badak yang betul 15--24 dari jumlah STP

Dampak “Pengembangan” Suaka Badak Sumatera Terhadap Ekosistem Taman Nasional Way Kambas

Marizal Ahmad
Kepala Lab Ekologi Unila

I. Pendahuluan

Peningkatan status Way Kambas dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional relatif masih baru, tetapi kawasan ini telah lama dikenal dan menjadi aset wisata Lampung dengan ciri spesifiknya yaitu sekolah gajah dengan berbagai atraksi gajah yang akrab dengan pengunjung. Way Kambas tidak hanya memiliki atraksi gajah, juga berpotensi menimbulkan gangguan gajah terhadap masyarakat disekitar kawasan atau sebaliknya yang menjadi sumber konflik antara pengelolaan kawasan ini dengan masyarakat.

Taman Nasional Way Kambas yang meliputi wilayah seluas 130.000 ha didukung oleh berbagai tipe ekosistem hutan dataran rendah dan hutan rawa yang telah mendukung keberadaan berbagai jenis satwa liar (lebih dari 48 jenis mamalia dan 286 jenis burung). Keanekaragaman habitat dan jenis satwa liar ini merupakan daya tarik bagi kegiatan penelitian oleh berbagai lembaga dan perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fokus kegiatan penelitian yang menonjol di TN Way Kambas diantaranya tentang Ekologi Gajah (WWF, Southampton University), Ekologi Mentok Rimba (Wetland International, Himbio Unpad, Universitas Padjadjaran, Southampton University), Keberadaan Harimau Sumatera (Sumatran Tiger Project). Dua tahun belakangan ini telah dibangun lokasi “Penangkaran” Badak Sumatera yang dikenal dengan Suaka Rhino Sumatera atas kerjasama antara PHPA, IRF, Yayasan Mitra Rhino, Taman Safari Indonesia.

Bertolak dari kegiatan Penangkaran Badak Sumatera di TN Way Kambas ini, ternyata telah direncanakan juga oleh pengelola SRS pengembangan kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) pada zona pemanfaatan TN Way Kambas. Pengembangan Pariwisata Alam ini telah menjadi isu lingkungan diantara pengelolaan TN Way Kambas, Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Lampung.

Tanggapan Masyarakat Lampung terhadap upaya pengelolaan TN Way Kambas adalah sebagai wujud kepedulian untuk tidak terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan tanpa dasar ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan untuk generasi mendatang.

II. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam

2.1. Pengelolaan

- Manajemen pengembangbiakan badak sumatera di habitat alaminya merupakan hasil Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara Dirjen PHPA, International Rhino Foundation (IRF) yang berkedudukan di Amerika Serikat dan Taman Safari Indonesia (TSI) pada tanggal 7 September 1995.
- Pusat Manajemen Pengembangbiakan ini disebut Sumatran Rhino Sanctuary (SRS) sebagai upaya penyediaan kawasan yang luas dan alami yang diharapkan akan membuat Badak Sumatera berproduksi (Phase 1 = 291 ha, Ext 1 = 230 ha, Ext 2 = 255 ha, dan Ext 3 = 321 ha).
- Pengusahaan Pariwisata Alam akan menempatkan SRS sebagai suatu obyek atraksi alam yang diharapkan menjadi daya tarik pengunjung dan potensi lainnya dalam kawasan TN Way Kambas seluas 1000 ha yang dikelola oleh PT Suaka Rhino Sumatera.
- Tujuan Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Suaka Rhino Sumatera di TN Way Kambas ini salah satu diantaranya adalah *memberikan kontribusi finansial bagi terlaksananya kegiatan Program Suaka Rhino Sumatera.*

2.2. Legalitas Kegiatan

- Surat Keputusan Dirjen PHPA No. 15 /Kpts/DJ-VI/1998 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Pengembangbiakan Satwa dan Program Pariwisata Alam dalam rangka Pengembangan Konservasi In-situ Badak Sumatera di TN Way Kambas, Lampung. menetapkan :
 - a). Kawasan Luas 1.000 ha sebagai zona pemanfaatan dalam pengembangan pariwisata alam yang menunjang konservasi badak sumatera yang meliputi **Resort Way Kanan (975 ha), Way Negara Batin - Plang Ijo (15 ha) dan Kuala Kambas (10 ha).**

b). Kawasan seluas 9.000 ha sebagai zona lain (khusus) untuk pelaksanaan program
Konservasi Badak Sumatera

- Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam an. PT Suaka Rhino Sumatera seluas 1.000 ha di Zona Pemanfaatan TN Way Kambas, Nomor 903/Menhut-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997.
- Keputusan Dirjen PHPA Nomor 15/Kpts/DJ-VI/1998 tentang :
 - 1). Analisis Dampak Lingkungan Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Suaka Rhino Sumatera pada zona Pemanfaatan TN Way Kambas.
 - 2). Rencana Pengelolaan Lingkungan Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Suaka Rhino Sumatera pada zona Pemanfaatan TN Way Kambas.
 - 3). Rencana Pemantauan Lingkungan Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Suaka Rhino Sumatera pada zona Pemanfaatan TN Way Kambas.
- Surat Pengesahan Dirjen PHPA No. 1503/DJ-VI/PA/93 tentang Strategi Konservasi Badak Indonesia yang disusun oleh Dirjen PHPA bekerja sama dengan IUCN, WWF dan Yayasan Mitra Rhino untuk dapat dijadikan acuan untuk konservasi badak di Indonesia

III. Dampak “Pengembangan” Suaka Badak Sumatera

- “Pengembangan” Suaka Badak Sumatera dalam makalah ini adalah Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) oleh PT. Suaka Rhino Sumatera pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas. Pengembangan ini diduga akan menimbulkan beberapa masalah, di antaranya ;
 - 1) Tumpang tindih pengelolaan kawasan antara pihak TN dan PT. SRS
 - 2) Tidak cukup kuatnya alasan pengembangan menjadi PPA karena upaya penangkaran badak belum memberikan hasil yang mengindikasikan bahwa RPPA cenderung ingin mengeksploitasi SDA Way Kambas.
- Lokasi RPPA seluas 1000 ha merupakan tiga lokasi terpisah yang perlu jalur penghubung. Dan yang menjadi pertanyaan ;

- 1) Apakah semua lokasi itu memang berada dalam zona pemanfaatan TN Way Kambas.
 - 2) Sejauh mana peran zonasi TN Way Kambas untuk menjaga fungsi kawasan.
 - 3) Apakah sudah ada penetapan zonasi TN Way Kambas
- Penetapan lokasi RPPA belum mempertimbangkan potensi dan upaya konservasi TN Way Kambas secara menyeluruh sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan terhadap ;
 - 1) Status Populasi & Habitat Itik Liar
 - 2) Status Populasi & Habitat Harimau Sumatera
 - 3) Fungsi aliran Way Kanan dan Way Kambas sebagai sumber air tawar penting bagi kehidupan satwa liar di TN Way Kambas.
 - 4) Status Populasi & Habitat Buaya di Blok Simpang Sungai
 - Dokumen Amdal, RPL dan RKL Pengusahaan Pariwisata Alam di TN Way Kambas kurang memperlihatkan fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman jenis satwa yang perlu dijaga kelangsungan hidupnya.
 - Pemberian izin PPA oleh PHPA kepada PT. SRS seolah-olah menunjukkan “ketidakmampuan” PHPA dan Pengelola TN Way Kambas untuk mengelola Kawasan Konservasi ini. Apakah ini sebagai tanggapan terhadap kelanjutan dari kurang berkembangnya Pusat Latihan Gajah di TN Way Kambas
 - RPPA oleh PT SRS ternyata tidak berbasis pada keberhasilan program konservasi badak Sumatera dan cenderung lebih kepada kepentingan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam TN Way Kambas.
 - Pengembangan SRS perlu mempertimbangkan aspek pengelolaan, ekologis dan sosio-ekonomi masyarakat sekitar kawasan agar kelangsungan kawasan konservasi ini benar-benar bermanfaat bagi banyak pihak.

IV. Kesimpulan

1. “Pengembangan” SRS di TN Way Kambas dalam bentuk Pengusahaan Pariwisata Alam perlu dikaji ulang karena potensi Way Kambas sebagai Taman Nasional bukan khusus hanya dipertahankan untuk mendukung kelangsungan penangkaran badak hasil tangkapan.
2. Pengembangan potensi “Ecotourism” TN. Way Kambas seharusnya berbasis pada peningkatan SDM dan Sarana Pengelola TN. Way Kambas dan juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar Kawasan.
3. Kelanjutan Program Penangkaran badak di TN Way Kambas perlu menjadi bahan pertimbangan jika memang sulit dalam masalah pembiayaan.

Sumber Bacaan

International Rhino Foundation, Yayasan Mitra Rhino. PIHPA., Sumatran Rhino Sanctuary, Site Evaluation and Work Plan, 1995.

PT. Sumatran Rhino Sanctuary, Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam PT. SRS pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas (buku I dan II). 1998.

PT. Sumatran Rhino Sanctuary, Analisis Dampak Lingkungan Pengusahaan Parawisata Alam PT. SRS pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas (Ringkasan Eksekutif). 1999.

PT. Sumatran Rhino Sanctuary, Rencana Pengelolaan Lingkungan Pengusahaah Pariwisata Alam PT. SRS pada Zona Taman Nasional Way Kambas. 1999.

PT. Sumatran Rhino Sanctuary, Rencana Pemantauan Lingkungan Pengusahaah Pariwisata Alam PT. SRS pada Zona Taman Nasional Way Kambas. 1999.

DISKUSI

Penanya :

1. Dirman (JPWK) :
 - Kenapa Way Kambas dijadikan lokasi penangkaran
2. Panji (JPWK) :
 - Masalah Elektrik fan

Jawab :

1. Dirman (JPWK) :
 - Way Kambas bukan lokasi yang diincar-incar tapi layak untuk tersebut di banding BBS Serta lebih baik aksesibilitasnya dan dapat meningkatkan wisata
2. Panji (JPWK) :
 - Tergantung tujuan karena hanya sekedar kejutan kepada hewan yang mau masuk atau Keluar.
3. Tambahan informasi oleh Marizal Ahmad :

BADAK SUMATERA

- MoU PHPA, IRF, TSI Tgl. 7 Sept. 1995
- Pusat Managemen Pengembangbiakan Badak "SUMATRAN RHINO SANCTUARY" SRS didukung oleh ;
- SK Dirjen PHPA No.15/Kpts/DJ-VI/98

Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program

Pengembangbiakan Satwa dan Program Pariwisata Alam dalam rangka Pengembangan Konservasi In-Situ Badak Sumatera Di Taman Nasional Way Kambas

- 9.000 ha untuk Pelaksanaan Konservasi Badak Sumatera (zona khusus)
- 1.000 ha zona Pemanfaatan untuk PPA tdr ;
 - Resort Way Kanan (975 ha)
 - Negara Batin--Plang Ijo (15 ha)
- Kuala Kambas (10 ha)
- Konsensi Penguasaan selama 30 tahun, dari tahun 1998 s.d. 2028

**Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) pada lokasi zona Pemanfaatan
TN Way Kambas**

- PT. Suaka Rhino Sumatera
- Dokumen Amdal
- Dokumen RPL
- Dokumen RKL

- Mendukung Finansial Penangkaran Badak Sumatera

**TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS
SK MENHUT NO.185/Kpts-II/97**

- Kesesuaian Zonasi TN. Way Kambas dengan PPA akan menjadi masalah sehubungan dengan belum adanya pengesahan zonasi kawasan secara ilmiah
- Alasan “Pengembangan” SRS cenderung hanya untuk eksploitasi TN. Way Kambas
- Perlu pertimbangan fungsi konservasi yang ada di TN. Way Kambas.

**KONSEP STRATEGI
PERANAN SERTA MASYARAKAT DALAM USAHA
KONSERVASI BADAK SUMATERA (*Dicerorhinus Sumatrensis*)
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS.**

Dirman
Komite Pengarah JPWK

Latar Belakang

Di dunia ini di mana Iptek telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan alam yang menjurus kepada pemanfaatan yang terus-menerus dan habis-habisan, sekelompok minoritas penduduk yang terasing dari peradaban modern juga cenderung cepat punah lebih cepat dari pada kepunahan ekosistem alaminya. Ini berarti juga punahnya kebudayaan dari tradisi lama yang sebelumnya masih tetap bermanfaat bagi manusia modern, seperti lingkungan alami, cara-cara manusia bertahan hidup dan menyatu dengan alam, sumber pangan dan obat-obatan yang semuanya terdapat dalam satu ekosistem hutan tropis basah, yang secara kualitatif dan kuantitatif menurun nilainya. Bila kelompok manusia ini punah akan berarti kerugian besar bagi dunia mengenai pengalaman ribuan tahun yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini.

Penguasaan sumber alam yang super luas oleh orang per orang yang selama ini terjadi tidak hanya berlangsung dalam hutan tetapi juga terjadi dalam hal tanah non-hutan atau tanah pertanian. Yang menarik dari hal tersebut bukanlah hanya luasnya sumber alam yang dikuasai oleh orang per orang itu tetapi bagaimana orang-orang itu dapat memperoleh hak menguasai sumber alam tersebut. Disinilah masalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi keberadaannya dalam satu negara menjadi sangat penting. Selama pemerintahan yang terdahulu (orde baru) demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi tidak dikenal oleh rezim itu sebagai dasar-dasar dari negara dan pemerintahan yang modern. Karena tanpa adanya demokrasi maka pemerintah rezim itu melihat sumber alam yang dimiliki oleh bangsa ini sebagai milik pribadi para pemimpin bangsa dan dipergunakan untuk hadiah bagi orang-orang yang dianggap berjasa dalam membantu pimpinan rezim dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Sejalan dengan laju perubahan, pemerintah yang ada sekarang harus membuka diri untuk menumbuh kembangkan “paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan menyemangati pola pengelolaan hutan/lahan tanpa eksploitatif (lestari) dan harus mengindahkan hak-hak masyarakat lokal/adat”.

Selama ini masyarakat lokal tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan pengelolaan sumberdaya alamnya. Padahal dengan berpijak pada undang-undang dasar pasal 18 sebetulnya keberadaan masyarakat adat dan teritorinya diakui sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal ini, menurut Emil Salim, pemerintah kemudian

mengeluarkan UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Keluarga Sejahtera, yang mengatur hak penduduk sebagai anggota masyarakat dan hak atas pemanfaatan warisan adat. Dengan adanya kedua aturan hukum ini jelas bahwa masyarakat lokal menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena wilayah mempunyai pengetahuan dan kearifan yang sudah teruji selama ribuan tahun. Dengan pengetahuan dan kearifan yang dimilikinya mereka mampu diungkapkan oleh Gunawan Wiradi, pengamat soal-soal pertanahan dari Bogor, masalah tanah khususnya kepemilikan tanah menjadi sumber kesalahan terbesar bagi Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan.

Reorientasi Dasar Kebijakan Politik Negara

Dalam bagian awal telah dijelaskan, bagaimana strategi pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan selama ini. Kita tidak mau lagi terjebak, bahwa prinsip *government can do no wrong* mesti kita kubur dalam-dalam. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa terutama pemerintah sekarang ini mengintropeksi, bahwa kebijakan yang terdahulu sangat menghancurkan tatanan struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan melakukan introspeksi demikian, nyatalah bahwa reformasi yang menyeluruh menghendaki sebuah reorientasi mendasar dari landasan politik yang akan dikembangkan nanti. Berkaitan dengan keinginan melindungi hak-hak dasar warga dalam pengelolaan sumber daya alam, maka M. AS. Hikam memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama; format dan struktur politik baru yang dibuat haruslah benar-benar berangkat dari visi politik yang dilandasi kedaulatan rakyat, dengan memberikan tekanan pada dilindunginya hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh perangkat perundangan dan institusi politik yang dibuat nanti harus diukur sampai sejauh mana mereka mengandung prinsip kewarganegaraan (*citizenship*) itu.

Kedua; agar gagasan perlindungan hak-hak politik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat dilaksanakan, maka model pembangunan yang bottom up harus direalisasikan. Untuk itu, lingkungan politik yang kondusif harus dibuat melalui pelaksanaan prinsip desentralisasi. Desentralisasi ini bukan hanya dalam konteks administratif atau yang disebut dekonsentrasi saja, melainkan meliputi desentralisasi politik yang di sebut devolusi. Yang terakhir ini menyiratkan pentingnya otonomi lembaga-lembaga politik dan sosial, khususnya ditingkat daerah TK II (UU No. 22 tahun 1999) yang dianggap paling dekat dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga ; diperlukan pembuatan model-model pembangunan alternatif yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini peran serta LSM karena ia akan mampu memberikan sumber daya serta program-program pemberdayaan yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat.

Wacana Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Apa yang di sebut dengan proses pembangunan yang bottom up adalah sebuah proses dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung (secara partisipatif) untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa LSM-LSM penggiat pembangunan yang sangat respek dengan kesenjangan yang di alami selama ini. Model alternatif yang ditawarkan ini adalah yang berbasisi ekologi, kearifan tradisional dan pengetahuan masyarakat setempat, yang lebih dikenal dengan sebutan Eco-community Based Forest System Management (ECBFSM).

Lahirnya gagasan ECBFSM ini didasari pada beberapa hal :

1. Sejarah eksploitasi hutan mengakibatkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam masa depan manusia.
2. Kesalahan konsep ilmu kehutanan selama ini terutama tidak terakomodasinya masyarakat yang turun temurun hidup bersama hutan.
3. Hutan tidak ada yang punya maka secara sepihak dikuasai negara.
4. Rakyat tidak seharusnya tinggal di hutan karenanya ada upaya pemerintah untuk menciptakan petani menetap.
5. Pola pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal/tradisional di anggap tidak ilmiah.
6. Lemahnya kontrol masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alamnya dan pengabaian terhadap identitas lokal.
7. Pengetahuan tradisional (lokal knowledge) terancam punah karena tinggal segelintir orang yang memahami kearifan tradisional.
8. Masyarakat lokal senantiasa dikeluarkan dari sistem-sistem hutan (ekosistem) karena dianggap faktor penyebab degradasi ekosistem hutan.
9. Adanya kesenjangan dan ketidakselarasan antara konsep dan praktek mengelola dan melestarikan sumber daya hutan.

Selain dari beberapa hal diatas saja yang menjadi dasar mengapa model ini ditawarkan, melainkan bagaimana seharusnya keuntungan dalam pengelolaan hutan/sumber daya alam tidak semata-mata hanya untuk sebagian orang saja. Dalam buku Agenda 21 Indonesia, disebutkan bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah;

1. Perlu ditingkatkan kemampuan dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan karena laju reboisasi jauh dibawah laju penebangan pohon.
2. Pembagian keuntungan yang adil dari kegiatan kehutanan, baik komersial maupun konservasi/rehabilitasi terutama dengan masyarakat lokal, karena kehidupan hampir 12 juta orang sangat tergantung dari hutan.
3. Hutan merupakan juga sumber pengetahuan dan budaya yang mempunyai keterkaitan erat dengan hutan.

Kemudian strategi pengelolaan sumberdaya alam hutan yang pada awalnya dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka saat ini lebih diarahkan pada:

1. Pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup
2. Keuntungan pengusaha atau perusahaan bergeser kepada keuntungan sosial
3. Kelestarian produksi bergeser pada produksi kelestarian ekosistem
4. Produksi kayu bergeser pada produksi non kayu
5. Untuk mencapai pembangunan dengan model berbasis masyarakat (ECFSM), maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

Prinsip 1:

Aktor utama adalah rakyat (masyarakat lokal). Mereka adalah yang berkepentingan langsung, yang merasakan manfaat atau akibat dari cara-cara pengelolaan sistem hutannya. Prinsip ini menjadi hal yang penting, karena selama ini inisiatif-inisiatif masyarakat lokal yang telah terbukti berhasil dalam mengelola sistem hutannya, kalah atau terdominasi oleh program-program yang berhubungan dengan hutan masyarakat yang datang (atau dipaksakan) dari pihak luar yang justru memarginalisasikan masyarakat lokal itu sendiri dan ekosistem hutannya. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan LSM.

Prinsip 2:

Fokus perhatian pada perlindungan fungsi komponen hutan (ekosistem hutan). Hutan sebagai komponen utama, merupakan 'tulang punggung' bagi berjalan atau berfungsinya bentuk-bentuk pemanfaatan lahan lainnya serta sumber inspirasi, kreatifitas dan aktivitas masyarakat lokal. Karena fungsi ekosistem hutan merupakan fokus pemerhati pertama dalam setiap perencanaan dan aktivitas, maka melindungi dan memelihara fungsi-fungsi ekosistem hutan lebih penting dari pada fokus kepada apa yang dimanfaatkan dari hutan.

Prinsip 3:

Precautionary principle untuk seluruh rencana dan aktivitas. Maksudnya seluruh rencana harus dikaji – diduga dampaknya terhadap kepentingan perlindungan atau penguatan fungsi-fungsi ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Prinsip 4:

Pengetahuan lokal sebagai landasan kebijakan perencanaan dan aktivitas, pengetahuan luar perlu proses kajian dan adaptasi lebih dahulu. Pengetahuan lokal menduduki posisi penting dan melandasi kebijakan dan tradisi sistem, sedangkan pengetahuan dari luar, hanya untuk memperkaya setelah melakukan proses kajian yang kritis (*precautionary principle*) dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal.

Prinsip 5:

Perencanaan dan aktivitas pada berbagai aras (waktu dan ruang). Untuk memelihara fungsi-fungsi ekosistem hutan dalam peranannya terhadap keinginan

masyarakat lokal, maka perencanaan dan aktivitas mesti didesain untuk waktu panjang dan dalam ruang yang luas.

Prinsip 6:

Prinsip keanekaragaman. Keanekaragaman mendasari berbagai bidang kegiatan dalam jenis dan genetis (*biodiversity*), pola budidaya dan pemanfaatan sumber daya sistem sosial, sistem ekonomi.

Prinsip 7:

Teknologi kerakyatan. Seperti juga pengetahuan dari luar, teknologi yang digunakan jika bukan teknologi lokal adalah yang telah melalui proses adaptasi yang berada dalam batas-batas yang dikuasai masyarakat.

Prinsip 8:

Ekonomi kerakyatan. Skala produksi tidak dibatasi kecuali oleh prinsip-prinsip kelestarian (*sustainability*) dan kearifan sosial budaya masyarakat lokal. Rakyat dimungkinkan mengupayakan sistem ini secara menguntungkan (*economic oriented*) melalui wirausaha mandiri, *co-management*, atau *join venture*.

Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi Badak di TNWK

Kepedulian penggiat lingkungan/LSM di Lampung terhadap persoalan konservasi TNWK diwujudkan dalam bentuk suatu forum dengan sebutan Jaringan Peduli Way Kambas (JPWK). Lahinya forum ini didasari sejak ditetapkannya TNWK sebagai kawasan konservasi tahun 1989, belum optimalnya penanganan kawasan, baik ditengah perdebatan tentang solusi bagi pelestarian badak sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*) yang terancam punah oleh berbagai sebab, khususnya dengan semakin menyempitnya luas dan memburuknya kondisi habitat di kawasan konservasi ini.

Dari pantauan JPWK bahwa hal yang paling krusial adalah faktor sosial ekonomi masyarakat disekitar TNWK menjadi sangat penting diperhatikan dan harus menjadi prasyarat bagi upaya-upaya apapun dalam usaha pelestarian badak di kawasan ini. Menurut keyakinan di kalangan jaringan ini aksi yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan ancaman yang muncul dari faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Untuk maksud inilah harus ada “program pelestarian badak sumatera dengan melibatkan masyarakat setempat”.

Strategi ini kemudian diterjemahkan kedalam suatu rencana aksi dalam mendukung pelestarian badak sumatera di TNWK yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar TNWK.

KONSEP PERAN SERTA MASYRAKAT DALAM USAHA KONSERVASI BADAK SUMATERA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Dasar : Pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang
⇒ Politik pemerintah terdahulu yang bersifat sentralistik

- Hilangnya hak politik masyarakat yang paling dasar yaitu berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat
- Kegiatan pembangunan tidak pernah memasukkan perhitungan-perhitungan sosial budaya dengan sungguh
- Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan perhainya terlalu difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat efisiensi, profit-oriented dan pertumbuhan ekonomi secara makro.

↓
Berakibat !!

Muncul dampak-dampak negatif modernisasi yang dijalankan tanpa mengindahkan lingkungan, tradisi dan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran dan target.

↓
Bagaimana sekarang ?

Paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi menyempatkan pola pengelolaan hutan tanpa eksploitatif (Sustainable) dan mengindahkan hak-hak masyarakat lokal/adat

↓
Solusi (model)

Eco-community based Forest System Management (ECBFSM)

- Pendekatan pembangunan yang berbasis daya dukung ekosistem, kearifan tradisional dan pengetahuan masyarakat lokal
- Pendekatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung (secara partisipatif)

Agar model ECBFSM ini tercapai, harus dilakukan pembaharuan-pembaharuan :

Pertama : Adanya kehendak politik/Kebijakan yang sejati.

Format dan struktur politik baru yang dibuat haruslah benar-benar berangkat dari visi politik yang dilandasi kedaulatan rakyat, dengan membeikan tekanan pada dilindunginya hak-hak dasar masyarakat.

Kedua : Agar gagasan perlindungan hak-hak politik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat dilaksanakan, maka model pembangunan yang bottom up harus direalisasikan.

Melalui pelaksanaan prinsip desentralisasi.

- Dalam Konteks asdmistratif atau dekonsentrasi
- Devolusi, artinya pentingnya otonomi lembaga-lembaga politik dan sosial, khususnya di tingkat daerah TK II (UU No. 22 tahun 1999) yang dianggap paling dekat dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga : Model-model pembangunan alternatif yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.

- Partisipasi aktif semua komponen sosial (LSM) yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat.

Keempat : Elit penguasa harus terpisah dari elit tuan tanah atau elit bisnis besar

Kelima : Harus tersedia data dasar keagrarian yang lengkap dan teliti

⇒ **Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Konservasi Badak di TNWK**
Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

1. Studi tentang home rang Badak di TNWK
 - Untuk menentukan habitat
 - Untuk menentukan daerah/desa yang berdekatan dengan habitat badak
2. Penguatan ekonomi masyarakat
 - Pengembangan sektor ekonomi sesuai dengan kondisi bentang alam (landscape) dan keinginan masyarakat setempat
 - Pembuatan kelompok masyarakat pelestari Badak TNWK
3. Penyuluhan tentan konservasi TNWK
4. Pengembangan pemanfaatan zona tradisional
5. Pembuatan kesepakatan atau agreement secara legal
6. Pelibatan masayrakt dalam pengaman Badak di TNWK
7. Obyek Wisata
8. Pencemaran Way Kambas

Refrense

Forum Konservasi Keanekaragaman Hayati Berdimensi Kerakyatan. 1996. Pos Bio; Media Komunikasi BioForum; Nomor 08-9 Februari 1996. Jakarta.

Ganip Gunawan. 1997. Kerangka Pendekatan Eco-community Based Forest System planning, Sebagai Satu pendekatan Penguatan SHK. Latin. Bogor.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/UNDP. Ringkasan Agenda 21 Indonesia; Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin). 1999. Kembalikan Hutan kepada Rakyat. Pustaka Latin. Bogor.

DISKUSI

Pak Wahyu (Kepala BTN Way Kambas) :

Kita bicara kondisi saat ini pola masyarakat (People) itu yang mana, saya gambarkan dulu 10 orang dengan pola makan, sandang itu akan terselesaikan sekarang terjadi perubahan dimasyarakat pola kehidupan konsumtif ini perlu kita cermati sehingga masalah lokal yang kita kembangkan tidak hanya dibebberapa tempat karena seputaran Way kambas banyak pendatang apabila kesempatan ini hanya diberikan masyarakat lokal saja kita ini manusia ada yang iri kenapa dia boleh saya tidak. Ini juga perlu pemikiran-pemikiran apa yang kita cita-citakan akses masyarakat terbuka dan transparan dapat dilakukan secara baik dan tidak menimbulkan konflik .

Pak Eeng (Yayasan Mitra Rhino);

Saya tertarik dengan pernyataan Pak Nyoto masalah pelibatan masyarakat yang mana ?

Ada satu pemikiran yang perlu kita kaji peranan JPWK yang peduli Way Kambas sebagai mediator dan fasilitator yang menghubungkan ke masyarakat sehingga program TNWK yang akan dilakukan dapat mengundang masyarakat untuk duduk bersama untuk memahami permasalahan yang ada di Way Kambas secara menyeluruh.

Bapak Ali Hendra Gunawan (Kepala Desa Sukorahayu):

Berkaitan masalah keikutsertaan masyarakat Desa Sukorahayu ada dua persoalan yang pokok terjadi di TNWK akhir-akhir ini mulanya dari selatan, pertama perambahan, kedua pelepasan hewan ternak dikawasan Taman Nasional Way Kambas dan kami mempunyai harapan adanya aturan yang jelas dan tegas dari dinas dan adanya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat .Karena ada pernah terjadi orang yang mengatas namakan Dinas ingin mendirikan koperasi didesa kami. Tetapi itu tidak terjadi karena ada gerakan Dinas Kehutanan yang memberikan sosialisasi perundang-undangan ke desa dan ternyata orang itu adalah penipu. Jadi kami tidak mempertanyakan ikut sertanya masyarakat yang penting tolong tegakkan peraturan yang tegas untuk merubah kebijakan yang ada dan segera mengusut penjarahan tersebut dan kami mempertanyakan peran serta masyarakat seperti apa ?, apa masyarakat kelompok atau keseluruhan.

Jawaban :

Jadi kita harus memperdayakan di masyarakat Taman Nasional Way kambas dan kita juga harus memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat sebagai contoh : ada SK 662 oleh Menteri Jamaluddin dan direvisi menjadi 677 tentang HKM ini belum selesai ditingkat masyarakat, masyarakat sudah mengambil pengusahaan hutan sebebannya ini adalah salah satu problem jadi menurut saya kita perlu melihat posisi-posisi mana yang paling rawan terbuka terhadap penyalahgunaan.

Tambahan dari Moderator :

Saya sepakat dengan konsep Home range yang disampaikan oleh pemakalah dan perlunya penguatan ekonomi seperti apa, dan produk apa yang akan dihasilkan .

Penyuluhan dan sosialisasi tentang konservasi sesuai dengan pengembangan zona pemanfaatan tradisional yang sesuai dengan Taman Nasional dan masyarakat sekitarnya. Yang terpenting adalah penegakan aturan main yang jelas.